

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI TINGKAT GAMPONG**  
**Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman**  
**Kota Banda Aceh**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RUSY MARDHATILLAH**

**NIM. 180802082**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusy Mardhatillah  
Nim : 180802082  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas : Universitas Islām Negeri Ar- Raniry Banda Aceh  
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 5 Agustus 2000  
Alamat : Aspol Lamtemen

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 13 Desember 2023

Yang menyatakan



**Rusy Mardhatillah**  
**Nim. 180802082**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI TINGKAT GAMPONG**  
**Studi Analisis Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman**  
**Kota Banda Aceh**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**RUSY MARDHATILLAH**

NIM. 180802082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Muazzinah, B.Sc.MPA.**  
NIP.198411252019032012



**Zakki Fuad Khalil, S. IP., M.Si.**  
NIP. 199011192022031001

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI TINGKAT GAMPONG**  
**Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Desember 2023 M  
6 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua,

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,

  
Zakki Fuad Khalil, S. IP., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Penguji I,

  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

Penguji II,

  
Safwan, S.E., M.Si.  
NIDN. 1321017801

AR - RANIRY

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Mewujudkan *good governance* dalam pelayanan publik merupakan komitmen pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Gampong Seutui. Penerapan *good governance* dalam mewujudkan pelayanan publik diharapkan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan asas-asas demokrasi, yang menjunjung tinggi aspek pemenuhan, hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara. Dengan demikian, untuk mewujudkan terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik, maka aparat pemerintah desa harus selalu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap pelayanan publik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *good governance* dalam proses tata kelola pemerintahan di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka/dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat meningkatkan pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Seutui. Penerapan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan Gampong Seutui secara umum berjalan kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa dimensi yang tidak berjalan atau kurang optimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui adalah persoalan petugas pelayanan, serta ketidakdisiplinan beberapa aparat gampong dalam bekerja sehingga tidak jelasnya waktu pelayanan yang diberikan dengan begitu pemberian pelayanan dianggap tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif.

Kata Kunci: *good governance, pemerintah desa, tata kelola*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Tingkat Gampong (Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Mujiburrahman, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Terima kasih kepada Bapak Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.
5. Muhammad Thalal, Lc, M.S, M.Ed, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.
8. Serta yang istimewa sekali peneliti persembahkan skripsi ini kepada Ibunda tercinta meskipun telah tiada dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ayahanda tercinta, yang telah mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan peneliti dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyempurnaan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT peneliti serahkan semua kebaikannya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 19 Desember 2023  
Peneliti,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**Rusy Mardhatillah**  
**180802082**

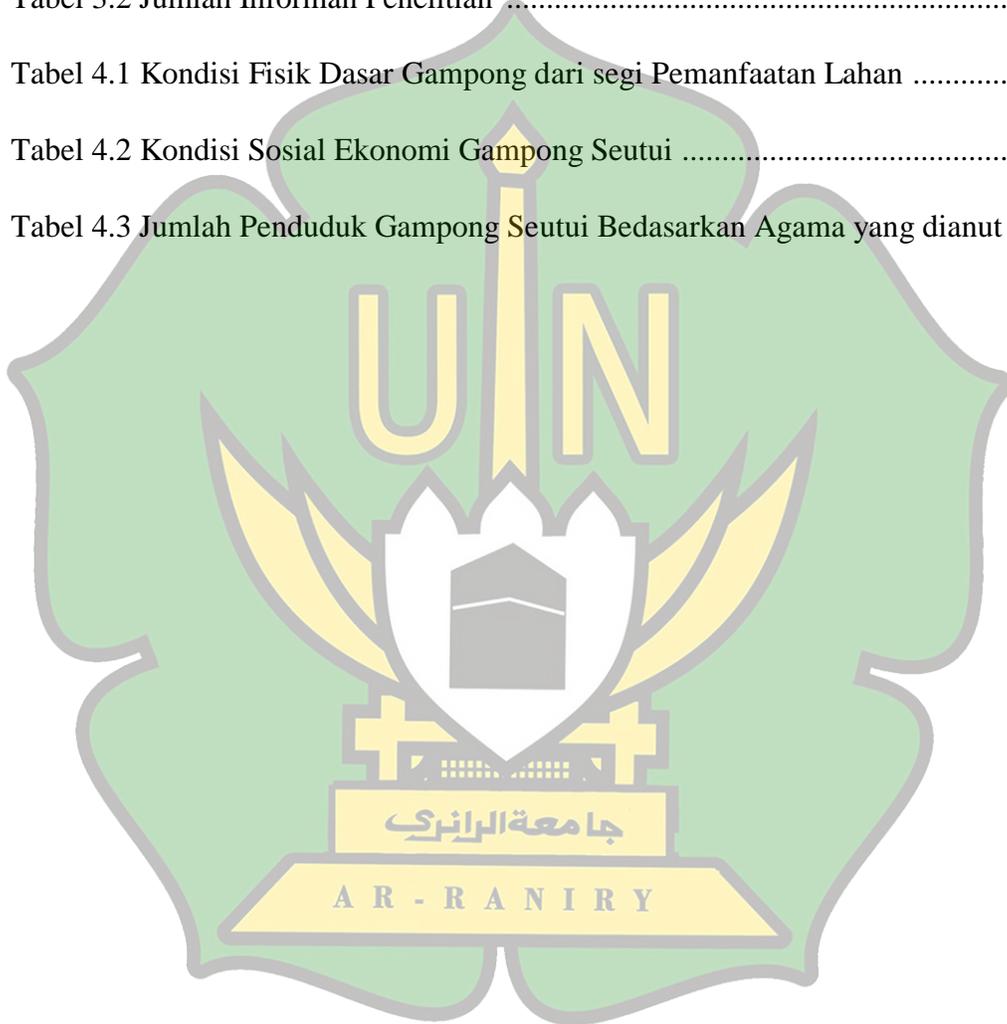
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori .....	11
2.2.1 Tata Kelola Pemerintahan .....	11
2.2.2 Konsep Pemerintahan Desa .....	13
2.2.3 Pengertian Desa .....	14
2.2.4 Good Governance .....	15
2.2.5 Prinsip-Prinsip Good Governance .....	15
2.3 Kerangka Berfikir .....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Desain Penelitian .....	25
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	25
3.3 Lokasi Penelitian .....	26
3.4 Sumber Data .....	27
3.5 Informan Penelitian .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1 Gampong Seutui .....	34
4.1.2 Visi-Misi .....	38
4.1.3 Struktur Organisasi .....	39
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Gampong Seutui .....	39
4.2 Penerapan Prinsip “ <i>Good Governance</i> ” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh .....	42
4.3 Faktor Penghambat Penerapan Prinsip “ <i>Good Governance</i> ” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	67
<b>DAFTAR PUTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>78</b>

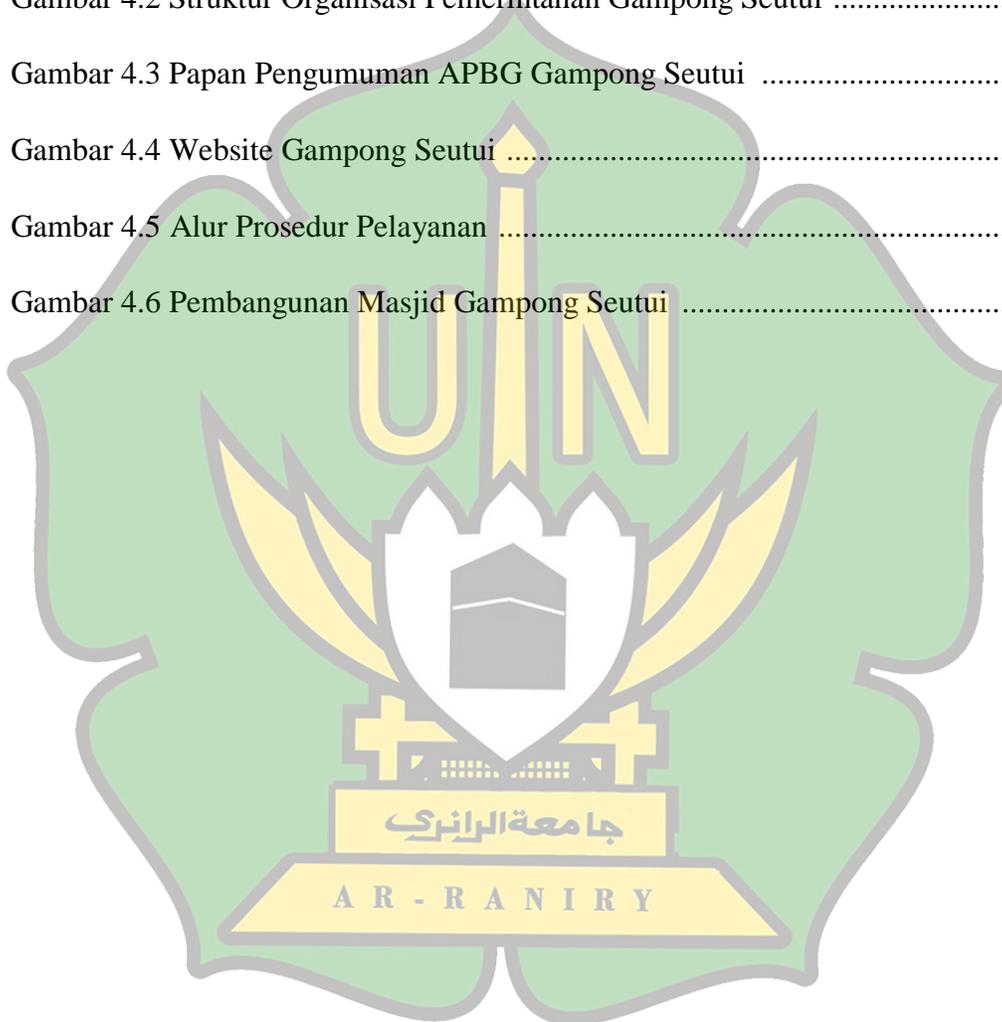
## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	26
Tabel 3.2 Jumlah Informan Penelitian .....	28
Tabel 4.1 Kondisi Fisik Dasar Gampong dari segi Pemanfaatan Lahan .....	35
Tabel 4.2 Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Seutui .....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Gampong Seutui Bedasarkan Agama yang dianut .....	37



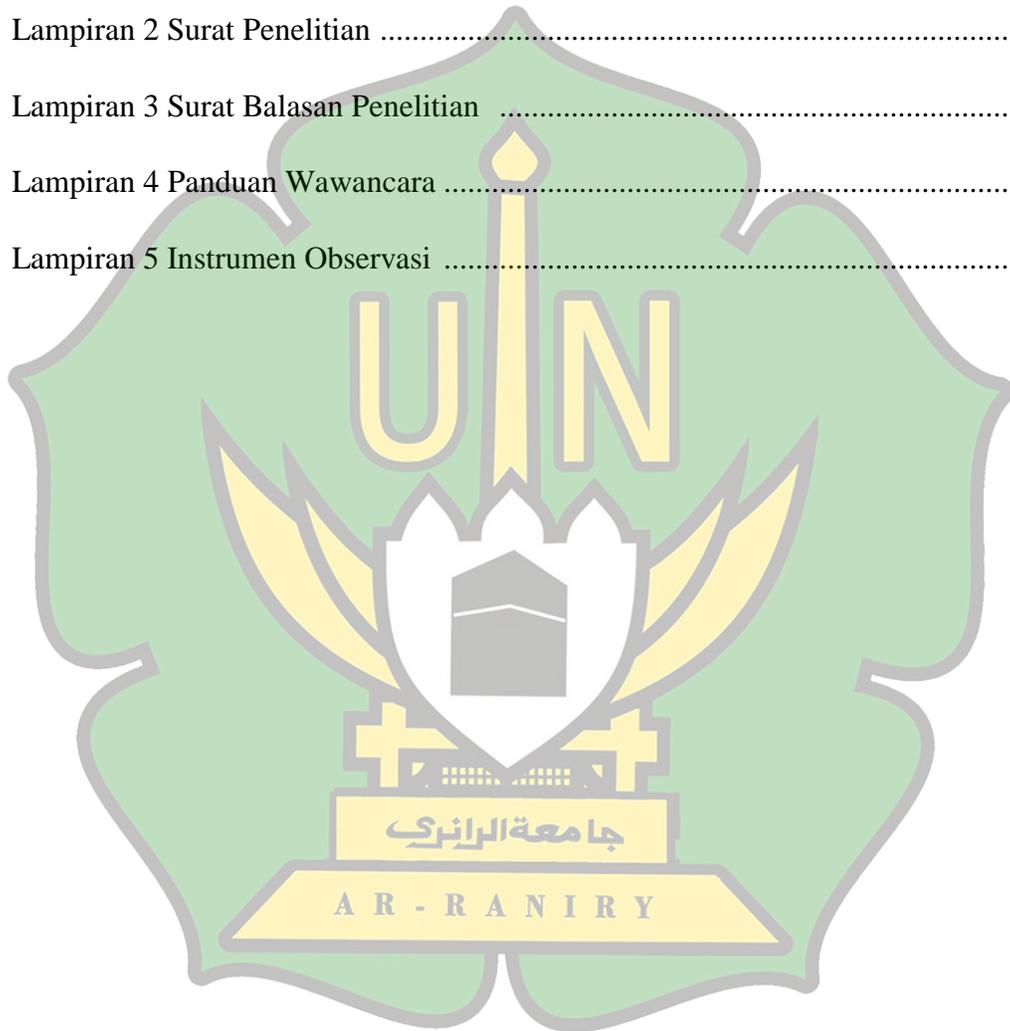
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Banda Aceh .....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Seutui .....	39
Gambar 4.3 Papan Pengumuman APBG Gampong Seutui .....	45
Gambar 4.4 Website Gampong Seutui .....	46
Gambar 4.5 Alur Prosedur Pelayanan .....	56
Gambar 4.6 Pembangunan Masjid Gampong Seutui .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing .....	70
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	71
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian .....	72
Lampiran 4 Panduan Wawancara .....	73
Lampiran 5 Instrumen Observasi .....	77



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan harapan bagi setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah desa berjalan dengan lancar dalam proses menerapkan prinsip *good governance*. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara urusan publik.

*Good governance* memiliki pengertian yang lebih luas cakupannya, yakni tidak hanya dalam pengertian pemerintahan negara, tetapi prinsip tata kelola keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi bisnis dan bahkan organisasi kemasyarakatan.<sup>1</sup> Semua bentuk organisasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tercakup dalam pengertian *good governance*. “Prinsip-prinsip yang biasa dipahami terkandung dalam ide *good governance* itu mencakup (a) *rule of law*, (b) efektifitas, (c) efisiensi, (d) transparansi, dan (e) akuntabilitas.”

Dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka pemerintah harus melakukan kerjasama dengan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Wibowo, Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance (Yogyakarta: YPAPI, 2004), 4.

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mewujudkan *good governance* tersebut. Pemerintah dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan *good governance* karena pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan sedangkan masyarakat menjadi pendorong keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan *good governance* serta peningkatan kualitas pelayanan.<sup>2</sup>

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tanggung jawab dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat mewujudkan harapan masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab agar terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah Desa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik pemerintahan yang baik, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 11.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dimana pemerintah sudah membuat produk hukum tentang pelayanan publik agar dapat menjawab semua harapan masyarakat serta masyarakat dapat menerima pelayanan tanpa pilih kasih. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 ayat (1) yang memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>4</sup>

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, pemerintah Gampong Seutui belum memberikan layanan yang optimal sehingga pelayanan publik yang disajikan belum efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada prinsip transparansi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari website gampong yang seharusnya sebagai akses pemberian informasi yang lebih efektif dan juga perwujudan *e-government*, nyatanya tidak berjalan dan dikelola dengan baik. Masyarakat masih kesulitan dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan Gampong Seutui. Hal tersebut tentu sangat menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lingkungan pemerintahan desa. Jika melihat luas gampong Seutui sendiri yang

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

mencapai 32,63 Ha, seharusnya pelayanan yang diberikan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat.

Kemudian pada prinsip efektifitas dan efisiensi dilihat di lapangan ternyata masih belum berjalan dengan baik di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Hal tersebut dapat dilihat dari visi misi gampong yang belum sepenuhnya diterapkan oleh para pegawai dalam melayani masyarakat. Masalah lainnya ialah kurang disiplinnya para pegawai pemerintah Gampong Seutui. Masalah disiplin yang masih perlu perbaikan ialah terkait dengan jam masuk dan pulang kerja para pegawai. Para pegawai pemerintah Gampong Seutui masih banyak yang masuk dan pulang kerja tidak sesuai dengan jam yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian semakin mendalam, tentang *good governance* dan pelayanan publik yang selanjutnya di angkat dengan judul “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) di Tingkat Gampong (Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi yang termasuk dalam prinsip-prinsip *good governance*.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dalam berbagai bidang pekerjaan yang digeluti aparatur pemerintah jelas sekali yang menjadi permasalahan adalah meyangkut kualitas pelayanan. Dari uraian di atas, masih banyak terlihat berbagai permasalahan yang meyangkut pada kualitas pelayanan

dan kinerja pegawai di wilayah kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Masih adanya pegawai yang tidak tepat waktu masuk kerja.
2. Masih rendahnya disiplin terhadap pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan kinerja dalam melakukan pekerjaan dan tugas

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Geuchik Gampong Seutui?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana tentang kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah desa mengenai peningkatan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dsmsm judul skripsi maka dari itu peneliti menjelaskan definisi istilah tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

- a. Tata Kelola merupakan suatu tindakan dalam cara menempatkan dalam hal-hal tertentu yang dimana sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Pemerintahan merupakan organisasi administratif yang bersifat kenegaraan dalam mengelola skala wilayah.
- c. Desa merupakan wilayah administratif negara dalam skala terkecil yang mengurus dengan sendirinya dan meaksanakan kebijakan negara dan Kabupaten/kota
- d. Pelayanan merupakan suatu tindakan mengurus kebutuhan konsumen.
- e. Publik adalah sekumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang besar.

- f. Kebijakan suatu tindakan yang dikeluarkan oleh sejumlah administrator setelah dilakukan musyawarah
- g. Sekdes merupakan pembantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Pada tahapan ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi I made artana, 2014 “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung”, Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif untuk menguraikan data berdasarkan fakta, data dan informasi sedangkan kuantitatif untuk menguraikan data melalui statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung berjalan baik. Berdasarkan Analisis Korelasi *Product Moment* diperoleh hasil  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel ( $0,827 > 0,361$ ) maka dapat dikatakan bahwa terdapat

hubungan yang sangat kuat antara implementasi prinsip-prinsip *good governance* dengan kepuasan pelayanan publik.<sup>5</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan dalam *good governance* dan pelayanan publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif, dan kuantitatif.

2. Skripsi Yulian Prabowo, 2017 “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good governance* terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Way Dadi Baru, untuk mengetahui dan menganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Way Dadi Baru serta untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di Kelurahan Way Dadi Baru. Hasil penelitian yaitu peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, untuk berkinerja tinggi diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang

---

<sup>5</sup> I Made Artan, “Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung” (Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar, 2014), 19.

bersikap, berpedoman dan etika dalam berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama aparatur sipil negara.<sup>6</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan dalam *good governance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian berbeda dengan kajian terdahulu.

3. A. Muh. Ikhsan W R, 2017 “Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggota BPD memiliki pekerjaan lain. Dan juga aparat desa yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat dan adanya kekosongan fungsi sekretaris desa yang harus merangkap sebagai Kepala Desa membuat proses

---

<sup>6</sup> Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelyrahan Way Dadi Baru) (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

asministrasi menjadi lamban. Dan transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat mendukung proses transparansi pemerintahan Desa.<sup>7</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian perbedaan lokasi penelitian, dan fokus penelitian berbeda dengan kajian terdahulu.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Tata Kelola Pemerintahan**

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan *good governance* untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kunci utama memahami tata kelola pemerintahan desa adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarnya, yang meliputi: partisipasi

---

<sup>7</sup> A. Muh. Ikhsan W R, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 39.

masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu: Pertama, prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Kedua, prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prinsip *good governance* diharapkan dapat melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Komitmen Pimpinan. Adalah konsistensi pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungannya. Pimpinan berfungsi menjadi penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor dalam pelaksanaannya.
- b. Dasar hukum yang kuat. Setiap pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik, harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk Peraturan atau Keputusan. Dalam rangka keberlanjutan suatu kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik sebaiknya dasar hukum yang dipakai adalah peraturan daerah/peraturan desa sehingga walaupun terjadi pergantian pimpinan daerah, kebijakan masih akan tetap berjalan.

c. Dukungan dari lingkungan internal dan masyarakat. Dukungan tersebut atas kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola dan diperuntukkan bagi mereka.

d. Inisiatif internal. Dorongan bagi timbulnya gagasan/inisiatif untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik idealnya muncul dari gagasan-gagasan internal jajaran pegawai maupun pimpinan yang berada di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. Perbaikan sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif dan musyawarah para pengambil kebijakan daerah, yang kemudian disosialisasikan ke seluruh jajarannya akan menghasilkan dukungan dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf<sup>8</sup>

### 2.2.2 Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Kepala desa bertanggung jawa kepada Badan Perwakilan Desa dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati Desa dapat melakukan

---

<sup>8</sup> Hendi Sandi Putra, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.* (2017)

<sup>9</sup> Widjaja. HAW, "Otonomi desa merupakan Otonomi yang Asli", Bulat, dan Utuh,(Jakarta: rajagrafindo persada, 2003), hlm. 3

perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.<sup>10</sup>

### 2.2.3 Pengertian Desa

Pemerintahan Desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa ataupun penyelenggara untuk membangun Pemerintahan Desa. Perangkat Desa merupakan peangkat yang mewadahi Pemerintahan. Desa merupakan kata yang berasal dari Bahasa Jawa, terdapat dari berbagai etnik di Indonesia menyebut Desa dikenal dalam istilah seperti Aceh disebut sebagai *gampong*, makassar disebut *gukang*, minahasa disebut wanua. Secara fungsional, desa menjadi satu kesatuan wilayah administratif terkecil dalam pemerintahan Kabupaten/kota, dan menyelenggarakan urusan administrasi kenegaraan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm.4

<sup>11</sup>Qanun Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Perangkat Desa Diakses <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Pada> Tanggal 20 Januari 2023

## 2.2.4 Good Governance

*Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sector swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). *Good governance* adalah penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.<sup>12</sup>

## 2.2.5 Prinsip-Prinsip Good Governance

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Progamme*) tahun 1997, prinsip-prinsip *good governance* yaitu<sup>13</sup> :

### 1. Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### 2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung. Hlm 36

<sup>13</sup> Ibid, hlm.13

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan system dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Karakter dalam menegakkan rule of law:

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*);
- c. Hukum yang responsif;
- d. Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
- e. Independensi peradilan.

### 3. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan.

### 4. Responsif (*Responsiveness*)

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

### 5. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.

### 6. Keadilan (*Equity*)

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan.

### 7. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)

Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

### 8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

### 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis

diantara domain *governance* yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan *good local governance* sangat bergantung kepada:<sup>14</sup>

- 1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- 2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.
- 3) Kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*).
- 4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum.

#### 2.2.6 Konsep Pelayanan Publik

Kata Publik merujuk pada konteks Pelayanan Publik, diartikan sebagai kategori pembeda antar publik yang berarti umum dengan individu lain. Publik dalam konteks ini dikaitkan dengan pengertian publik dalam Bahasa Yunani yang berarti "*pubes*" yaitu kedewasaan. Kedewasaan mencakup fisik, emosional, maupun intelektual kemampuan bertindak secara publik.<sup>15</sup>

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan public menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum mengetahui arti kinerja pegawai publik, perlu

<sup>14</sup> Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung. Hlm 38

<sup>15</sup> Indris Patarai *Ombudsman dan Akuntabilitas Public*. Makassar. De La Macca, Tahun 2015 Hal.9.

diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. Organisasi public diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Secara eksplisit, Sianipar menjelaskan bahwa “Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”.

Moerir menyatakan, Pelayanan Publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pemberian pelayanan, fasilitas dan berbagai hal yang memudahkan masyarakat mencapai tujuannya sudah menjadi kewajiban pemerintah.<sup>16</sup> Aparatur Negara (Kepmen PAN) Nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik adalah berbagai kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah. Jadi pelayanan public dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, khususnya instansi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.9

yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Widodo, sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan public agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam memberikan layanan public seharusnya:<sup>17</sup>

1. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan.
2. Mendapat pelayanan yang wajar
3. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih
4. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dana tau perima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:<sup>18</sup>

- a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian.
- c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

---

<sup>17</sup> Widodo Joko, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang:CV. Citra Malang Tahun 2001, Hlm. 46.

<sup>18</sup> Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creativ. Tahun 2021, Hlm. 13

- e. Sarana dan prasarana yang memadai.
- f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

### 2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance

Dalam pelaksanaan pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi antara lain:<sup>19</sup>

#### a. Faktor Manusia Pelaksana (Man)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan *good governance* sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (*local government*) yang terdiri dari unsur pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat pelengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

#### b. Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*)

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making);

---

<sup>19</sup> Yuanida, Meilani (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. UNMUL. 11

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*actuating participation*);
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*cost benefit evaluation*);
4. Partisipasi dalam evaluasi (*evaluation participation*).

c. Faktor Keuangan (*Funding or Budgeting*)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian *good governance* di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor Peralatan (*Tools*)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian *good governance*. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan *good governance*.

e. Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan *good governance* karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar *good governance* dapat terwujud.

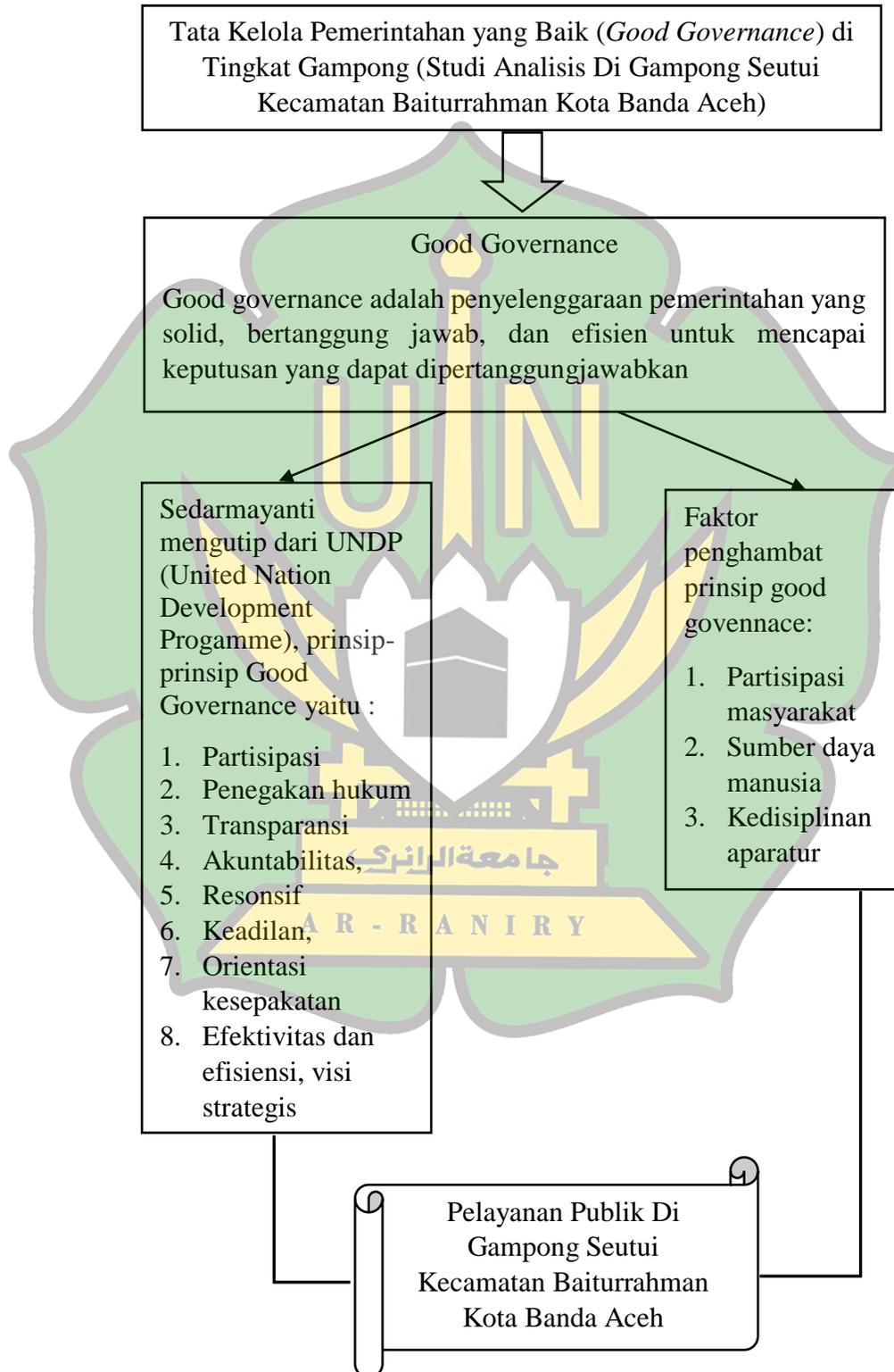
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir sangat penting agar sejalan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Tingkat Gampong (Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh). Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran, peneliti akan menjabarkan gambaran dalam bagan alur pemikiran. Adapun bentuk alur pemikiran yang dirancang sebagai berikut :



**Gambar 2.5**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif (Metode Kualitatif) dengan pendekatan deskriptif, artinya dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang gejala atau masalah yang ada, khususnya gejala berdasarkan apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini bersifat kualitatif (Metode Kualitatif). Subyek penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan di gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variable penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penentuan operasional variable ini bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusat dan membatasi objek tujuan untuk diteliti.<sup>20</sup> Definisi operasional variable merupakan batasan yang dijadikan oleh peneliti sebagai batasan masalah dalam penelitiannya agar masalah yang diangkat tidak menjadi luas. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional variable adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Raco, J.R. *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: (2010). PT. Grasindo, hlm 50

**Tabel 3.1**  
**Fokus Penelitian**

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Prinsip-prinsip good governance	1. Transparansi 2. Partisipasi 3. Penegakan hukum 4. Responsif 5. Orientasi Kesepakatan 6. Keadilan 7. Efektifitas dan Efisiensi 8. Akuntabilitas 9. Visi strategis	Sedarmayanti mengutip dari UNDP (United Nation Development Programme).
2.	Faktor penghambat prinsip-prinsip good governance	1. Sumber daya manusia, 2. Partisipasi masyarakat, dan 3. Kedisiplinan aparatur	Abdul Hamid Tome, <i>Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo, Gorontalo</i> Vol. 11 No. 1. Mei 2017. Hal. 1-15

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Lexy J Moleong, dalam menentukan lokasi penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu

keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.<sup>21</sup>

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti permasalahan yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Gampong Seutui masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip good governance dan belum terlaksana baik khususnya pada prinsip transparansi.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapat langsung saat melakukan penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung di kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Sumber data dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi terkait fokus permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh secara langsung berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara.

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 28.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi sumber pustaka dan dokumentasi serta foto.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun informan pada penelitian ini, yaitu:

**Tabel 3.2 Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah	Alasan
1.	Sekretaris Gampong Seutui	1 orang	Pihak yang berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa,
2.	Kasi Pemerintahan	1 orang	Sebagai penyelenggara layanan bagi masyarakat.
3.	Masyarakat Gampong Seutui	3 orang	Sebagai pihak penerima layanan publik
Total		5 orang	

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Grout dan Le Conte bahwa “dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.”<sup>22</sup>

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan disertai dengan pencatatan. Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta social sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) di gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Meliputi observasi lokasi penelitian, kondisi social pemerintahan dan lainnya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas

---

<sup>22</sup> Sutopo HB, Metode penelitian kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm.66

pertanyaan.<sup>23</sup> Menurut Sugiyono, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan panduan wawancara.<sup>24</sup> Dalam wawancara dengan informan, peneliti memberikan keleluasan kepada informan untuk menjawab segala pertanyaan, sehingga memperkuat data-data melalui pengamatan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh melalui pengamatan secara visual. Dalam penelitian ini, wawancara diperlukan untuk menghimpun data yang berbentuk perbuatan, tetapi berupa alasan-alasan motif-motif persepsi maupun sikap dari informan terkait tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat gampong.

### 3. Studi pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka/dokumentasi adalah suatu cara dalam mengumpulkan data penelitian yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan di Gampong Seutui Kota Banda Aceh. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku, jurnal, internet serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam

---

<sup>23</sup> Lexy. J. Moleong, *metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 135

<sup>24</sup> A.D. Gayatri, *Peningkatan Kemampuan Guru melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik Metode Kelompok Bagi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 7 Surakarta*. *Jurnal Pendidikan*. Surakarta: Dwija Utama, Vol, 10 No. 1 Februari 2019. Hlm. 12

penelitian ini meliputi Profil Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), penelitian terdahulu, maupun foto-foto.

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

#### 3.7.1 Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan untuk menguji hasil dari penelitian berdasarkan data yang sudah dikumpulkan selama proses penelitian untuk melihat validitas dan reliabilitas data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>25</sup> Triangulasi teknik tersebut adalah menggunakan cara dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan pasti.

Agar data penelitian dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan adanya uji keabsahan data. Uji tersebut sebagai berikut:

1. Credibility, merupakan teknik untuk menguji kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah dipersiapkan oleh peneliti, data tersebut meliputi perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan masyarakat agar penelitian tersebut diakui sebagai sebuah karya ilmiah.

---

<sup>25</sup> Moleong, J. lexy. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal. 330

2. Dependability, merupakan sebuah penelitian yang reliabel, yaitu apabila penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dengan proses yang sama maka akan mendapatkan hasil yang sama pula.

### **3.7.2 Classifying (Klasifikasi)**

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan diteliti secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

### **3.7.3 Verifying (Verifikasi)**

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup>

## **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang

---

<sup>26</sup> Ibid, hal.104-105

<sup>27</sup> Nana Sudjana Dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hlm. 84

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data terdapat komponen-komponen pokok sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pengumpulan data, mekanisme pengumpulan data dilakukan dua kali. Pertama, sebelum ke lapangan hasilnya dianalisis untuk keperluan penentuan focus penelitian yang biasa disebut sebagai data hasil studi pendahuluan. Kedua, pengumpulan data setelah di lapangan. Banyaknya data yang terkumpul atau diperoleh diperoleh di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data.
- b. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh di lapangan dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal pokok yang dianggap relevan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah disajikan dijadikan dasar untuk melahirkan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara dan akan berubah jika pengumpulan data selanjutnya ditemukan informasi baru dan terverifikasi, maka kesimpulan sebelumnya dilakukan penyempurnaan.

---

<sup>28</sup> Sugiono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. R&D . Alfabeta: Bandung. Hal49



sebelah timur berbatasan dengan gampong Neusu Aceh dan Neusu Jaya dan sebelah barat berbatasan dengan gampong Punge Blang Cut. Jumlah dusun yang ada di gampong Seutui terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu (1) dusun Sibayak, (2) dusun Seulawah, (3) dusun Glee Gurah, (4) dusun Kulu dan (5) dusun Kerinci.

Dari kondisi fisik dasar gampong dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan, gampong Seutui dengan luasnya 32,63 Ha dikelompokkan kedalam 6 (enam) bagian utama yang merupakan bagian dari luas keseluruhan gampong Seutui kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Tabel 4.1  
Kondisi Fisik Dasar Gampong dari segi Pemanfaatan Lahan

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Perumahan/Pemukiman	17,68
2	Pertokoan/Perdagangan dan Jasa	11,66
3	Taman Terbuka Hijau	1,00
4	Asrama/Panti Asuhan	1,60
5	Masjid dan Mushalla	0,66
6	Komplek Perkantoran	0,03
	Total Luas Pemanfaatan Lahan	32,63

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2022

Bentuk permukaan jalan utama antar gampong yang melalui gampong Seutui sudah dalam bentuk pengaspalan. Permukaan tanah dari gampong berbentuk rata dan dengan struktur dasar tanah berupa tanah merah. Gampong Seutui secara geografis diapit oleh dua buah sungai, yaitu sungai/Krueng Daroy dan sungai/Krueng Doi. Selama ini dalam berbagai kondisi iklim/cuaca yang terjadi gampong Seutui relative

aman dan menjadi daerah yang padat penduduknya karena letaknya yang sangat strategis.

Kondisi sosial ekonomi merupakan gampong yang berada dalam wilayah administratif kecamatan Baiturrahman, yang dominan dipengaruhi dengan kebudayaan perkotaan, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih kental dalam kehidupan kemasyarakatan di gampong Seutui.

Tabel 4.2  
Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Seutui

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	235
2	Karyawan Swasta	202
3	Pedagang	227
4	Wiraswasta	411
5	TNI/Polri	52
6	Buruh	103
7	Dokter	16
8	Mahasiswa	163
9	Pelajar	452
10	Dosen/guru	49
11	Jasa	332
12	Belum bekerja	431
13	Lainnya	685
	Jumlah	3358

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2022

Kondisi demografis gampong Seutui, jumlah penduduk pada per 1 januari 2022 berjumlah 3.358 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1.646 jiwa dan perempuan sejumlah 1.712 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1.016 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 103 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan jarak gampong Seutui dengan pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan Kota Banda Aceh adalah sekitar 1 km.

Meyangkut potensi gampong, Sumber daya Manusia (SDM), rata-rata penduduk gampong Seutui sudah menamatkan pendidikan jenjang SLTA dan sebahagian besar sudah mengecap pendidikan sampai SLTA, S1 bahkan S2 (Pasca Sarjana) serta S3. Hal ini tentu menjadi potensi besar yang menjadi motor penggerak pembangunan di gampong. Gampong Seutui menuju kearah percepatan pembangunan sekarang dan masa yang datang. Mengenai sumber daya alam (SDA) seperti yang telah diuraikan pada table 4.1. di atas, maka dengan luas gampong hanya 32,63 Ha maka sumber daya alam yang dimiliki gampong Seutui menjadi terbatas. Namun sebagian besar digunakan sebagai tempat usaha (Area Pertokoan) maka menjadi potensi tersendiri dalam hal usaha perdagangan dan jasa yang nantinya memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat gampong Seutui.

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk Gampong Seutui berdasarkan Agama yang dianut

No.	Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	3.190
2.	Katolik	43
3.	Budha	98
4.	Hindu	0
5.	Kristen	27
Jumlah		3358

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2022

Sebelum menjadi gampong, Seutui merupakan kelurahan, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 267 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, penghapusan kelurahan menjadi gampong diatur dengan qanun kabupaten/kota, yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan sebutan Kelurahan menjadi Gampong.

#### 4.1.2 Visi dan Misi

##### A. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, adapun visi Gampong Seutui adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Pemerintahan Gampong sebagai model pelayanan publik yang madani, responsif dan akuntabel.”*

##### B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang akan dilaksanakan Gampong Seutui adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terpadu dan aspiratif;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat gampong
4. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang mandiri dan dinamis; dan
5. Melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan gampong.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Seutui**



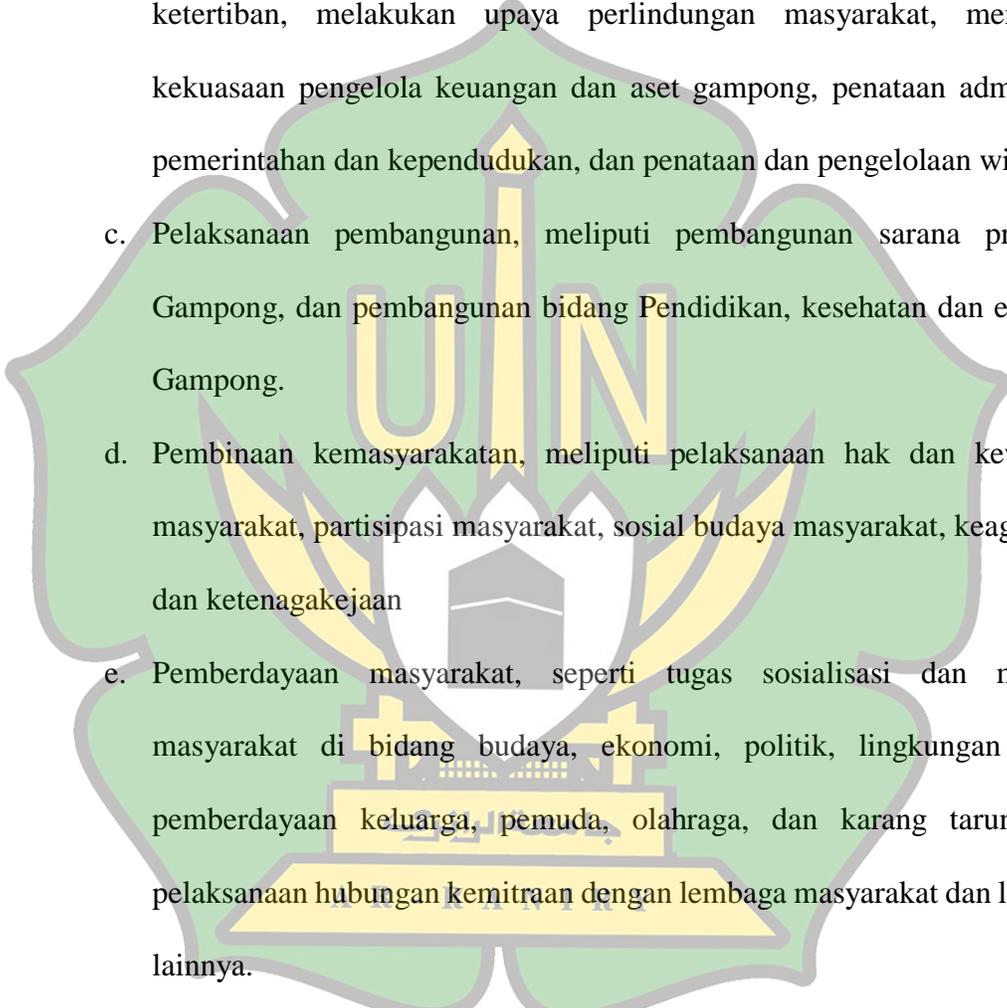
Sumber: Kantor Geuchik Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

### 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Gampong Seutui

Tugas pokok dan fungsi pemerintah Gampong Seutui sebagai berikut:

#### 1. Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam merencanakan, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang teknis, meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan administrasi umum, dan memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.

- 
- b. Penyelenggaraan pemerintahan gampong, meliputi tata praja pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong, penetapan Qanun Gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset gampong, penataan administrasi pemerintahan dan kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
  - c. Pelaksanaan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana Gampong, dan pembangunan bidang Pendidikan, kesehatan dan ekonomi Gampong.
  - d. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakejaan
  - e. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan pelaksanaan hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## **2. Kasie Pemerintahan**

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai biang masing-masing agar memahami tugasnya;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- f. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan Pembinaan pemerintahan Mukim, Gampong (Desa)
- i. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia.
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Masyarakat

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa

- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan kegotongryongan di desa
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa

#### **4.2 Penerapan Prinsip “*Good Governance*” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

Dalam menerapkan pelayanan publik, Gampong Seutui harus menerapkan prinsip “good governance”. Good governance merupakan upaya dari terwujudnya tata pemerintahan yang baik dari segi pelayanan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak professional, dan biayanya mahal.

Menurut Sadjijono *good governance* mengandung arti: “kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”.

Salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance* adalah transparansi. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi yang diberikan harus dapat dipahami dan dimonitor oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan adanya sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,

pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan, transparansi juga “menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai”.

Dari latar belakang yang berbeda para informan memberi jawaban untuk persoalan penelitian. Berikut ini adalah uraian informan:

**1. Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata kelola Pemerintahan Desa di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

**a. Prinsip Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya *good governance* dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yaitu:

“Kalau untuk keterbukaan informasi publik kita sangat terbuka bisa dilihat sendiri ada papan APBG segala macam pengumuman kita tempelkan setiap kegiatan yang ada dikampung kami selalu terbuka, karena itu sudah diamanahkan dalam UU keterbukaan informasi publik.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

Hal ini senada dengan yang diungkapkan kasi pemerintahan Gampong Seutui:

“Keterbukaan dalam pelayanan, kami semua sangat terbuka dalam hal apapun termasuk masukan dan saran dari masyarakat maupun aparatur gampong.”<sup>30</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat selaku pengguna layanan:

“Ada keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan disatu sisi keterbukaan petugas Gampong sangat terbuka ditambah lagi dengan adanya sosial media sehingga masyarakat tidak susah dalam mencari-cari informasi sehingga berkesinambungan antara masyarakat dengan yang ada di pemerintahan.”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara diatas yang telah dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa transparansi di Gampong Seutui sudah diterapkan dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Desa Seutui memberikan informasi terkait dengan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat nya dengan mengadakan rapat tahunan *Musrenbangdes*. Rapat tersebut beranggotakan Geuchik Gampong Seutui beserta beserta Perangkat Desa lainnya, serta tokoh-tokoh masyarakat Gampong Seutui, rapat tersebut berisikan tentang apa yang menjadi program prioritas gampong untuk satu tahun kedepannya.

Transparansi di gampong Seutui juga dapat dilihat dari dimensi dalam penyediaan informasi, penyusunan mekanisme peraturan dan peningkatan arus

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muklis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Alfattah Sidiq dan Pak Edi (Masyarakat Gampong Seutui)

informasi. Dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengukur transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Seutui terdiri dari pembuatan surat SKTM, surat keterangan domisili, surat keterangan untuk nikah, KTP sementara, surat keterangan pindah, surat keterangan izin usaha dan lain sebagainya.

Disisi lain sebagai salah satu bentuk Transparansi Publik pengelolaan APBG, Pemerintah gampong Seutui berupaya mensosialisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2023 melalui media Papan Infografis. Pemasangan Infografis (APBG) ini dilakukan atas dasar prinsip Transparansi Keuangan Gampong serta tercantumnya presentase pelaksanaan disetiap bidang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini.



**Gambar 4.3** Papan pengumuman APBG Gampong Seutui Tahun Anggaran 2023

Pemasangan infografis APBG ini dilakukan atas dasar prinsip Transparansi Keuangan Gampong. Selain itu pemerintah Gampong Seutui juga tetap melaksanakan sosialisasi APBG Tahun 2023 melalui acara-acara pertemuan warga lainnya.



**Gambar 4.4** Penyediaan informasi digital yang tidak bisa diakses

Sedangkan salah satu wujud transparansi di Gampong Seutui yang belum terlaksana dengan baik adalah keterbukaan kejelasan transparansi berbasis digital seperti, anggaran desa, kegiatan masyarakat dan pelayanan publik lainnya. Disini masyarakat tidak dapat memantau penggunaan anggaran desa secara online dan tidak dapat memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian atau kecurangan dalam penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk memperluas akses informasi desa online agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai desa tempat tinggal mereka.

## b. Prinsip Partisipasi

Prinsip kedua tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang telah dijalankan oleh Gampong Seutui adalah prinsip partisipasi. Partisipasi masyarakat yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Hasil wawancara peneliti dengan Sekdes mengenai informasi melalui kerjasama pihak swasta dalam memberikan pelayanan publik di Gampong Seutui bahwa:

“Masyarakat dengan swasta ikut berpartisipasi setiap ada kegiatan seperti disini ada RS Harapan Bunda yang disetiap ada kegiatan-kegiatan dikampung mereka selalu ikut berpartisipasi, jika masyarakat sudah pasti ikut contohnya seperti mereka selalu ikut dalam kegiatan gotong royong, dan kegiatan keagamaan juga. Contoh lembaga lain swasta yg ikut berpartisipasi disini ada Jasa Raharja, dan Bank BSI.”<sup>32</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan mengenai kerjasama dengan pihak swasta yaitu:

“Semua berpartisipasi dalam kegiatan ini apapun kegiatannya. misalnya pemilihan TPG kami membuat seperti pemilu berjalan dengan baik, jadi hasilnya tidak ada lagi komplain dari masyarakat karena sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri siapa yang akan menjadi ketua maupun anggota TPG.”<sup>33</sup>

Hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Seutui:

“Kami selaku masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa namun dalam pengambilan keputusan masih kurangnya masyarakat

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muklis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

yang mau memberikan sumbangsi pemikiran dan pendapat dimana dalam memberikan masukan dan saran hanya orang-orang itu saja.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa melalui kerjasama dengan lembaga swasta dalam menerapkan prinsip “*good governance*” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik mereka melibatkan swasta dalam setiap kegiatan pelayanan yang dibutuhkan contohnya seperti RS Harapan Bunda yang ikut membantu dalam memberikan pelayanan ambulance gratis untuk masyarakat Gampong Seutui ketika ada masyarakat yang sakit atau meninggal dunia. Dan disamping itu partisipasi masyarakat juga sudah diterapkan dengan baik. Salah satu bukti baiknya partisipasi masyarakat yaitu dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga musyawarah di Gampong Seutui. Bentuk- bentuk partisipasi lainnya yang dilakukan disini adalah masyarakat ikut dalam kegiatan melakukan kerja bakti membersihkan desa, gotong royong membantu tetangga yang sedang memiliki hajat, mengadakan posyandu, menjenguk tetangga apabila ada yang sakit, mengadakan siskambling/ ronda malam serta partisipasi masyarakat Gampong Seutui dalam mengambil sebuah keputusan yang ditampung dalam sebuah rapat yang dinamakan *Musrenbangdes*. Namun dapat juga dijadikan sebagai perbandingan bahwa gampong Seutui masih belum optimal dalam penerapan prinsip partisipasi dilihat dari kurangnya masyarakat yang mau memberikan sumbangsi pemikiran dan

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Alfattah Sidiq dan Pak Edi (Masyarakat Gampong Seutui)

pendapat dimana dalam memberikan masukan saran dominannya hanya orang-orang itu saja, sehingga masyarakat menganggap pendapat atau usulannya itu sudah mewakili suara dan kehendak masyarakat yang lain.

c. Prinsip penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip Ketiga yang diterapkan di Gampong Seutui adalah prinsip *rule of law* atau penegakan hukum. *Rule of law* dalam prinsip *good governance* merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam pelayanan yang diberikan aparatur gampong terhadap masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui:

“Pelayanan sesuai *Standar Operating Procedure* (SOP) bisa dilihat dari proses pelayanan yang telah kami berikan kepada masyarakat. Akan tetapi, terkadang di Gampong Seutui ada sedikit perbedaan birokrasi yang dilakukan yaitu kami berinteraksi langsung dengan masyarakat jadi ada hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan kearifan lokal.”<sup>35</sup>

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kasie Pemerintahan:

“Pelayanan yang diberikan sudah selalu didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP). Tidak ada masalah dalam penegakan hukum yang ada Di Gampong Seutui, Pemerintah Gampong Seutui akan memberikan sanksi tegas terhadap Perangkat Desa maupun masyarakatnya yang terjerat kasus hukum.”<sup>36</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat:

“Penegakan hukum yang dijalankan di Gampong Seutui sudah berjalan dengan baik saat ini perangkat desa selalu berusaha menangani jika ada masyarakat yang bermasalah. Selain itu prosedur pelayanan yang dijalankan di gampong selama ini juga sudah baik, contohnya masyarakat pengguna layanan telah mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelayanan yang diberikan juga sudah sesuai dengan

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis (Kasi Pemerintahan Gampong Setui)

*Standard Operating Procedure* (SOP), meliputi jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan.<sup>37</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, pelayanan publik yang dilakukan di kantor Geuchik Gampong Seutui sudah sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu penegakan hukum. Hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017, tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku maka pelayanan yang telah diselenggarakan oleh Gampong Seutui kini menjadi lebih baik dan merata.

Pemerintah Gampong Seutui di rasa tidak ada masalah dalam penegakan hukum yang ada Di Gampong Seutui, Pemerintah Gampong Seutui akan memberikan sanksi tegas terhadap Perangkat Desa maupun masyarakatnya yang terjerat kasus hukum. Pemerintah Gampong Seutui juga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum maksudnya disini penyuluhan tentang narkoba dan seks bebas agar masyarakatnya tidak terkena kasus narkoba dan pemerkosaan. Selanjutnya penegakan hukum yang dijalankan di gampong Seutui sudah berjalan dengan sangat baik saat ini. Misalnya, ada kasus harta warisan, KDRT, perkelahian pemuda dan sebagainya. Perangkat desa selalu berusaha menanganinya termasuk mereka melibatkan Linmas dan pihak kepolisian. Jika

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Alfattah Sidiq dan Pak Edi (Masyrakat Gampong Seutui)

memang tidak bisa ditangani, seperti kasus KDRT mereka menyarankan untuk dikembalikan dulu ke orang tua masing-masing. Setelah itu, baru kami naikkan ke Mahkamah.

#### d. Prinsip Responsif

Daya tanggap (*responsiveness*) adalah syarat yang harus dicapai sebagai langkah awal pelaksanaan *Good Governance*. Pemerintah harus cepat dan tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, pemerintah juga dituntut untuk peka dalam menangani masalah yang ada dalam masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui:

“Kalau respon kami selaku aparat gampong terhadap masyarakat, kami cukup merespon segala hal dengan baik. Baik itu yang bersifat kemasyarakatan sosial maupun bersifat pribadi.”<sup>38</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Muklis selaku Kasie Pemerintahan di Gampong Seutui.

“Kami selalu merespon masyarakat, ini menyangkut kebutuhan publik walalupun nanti penanganannya bertahap. Misalnya, ada kasus harta warisan, KDRT, perkelahian pemuda dan sebagainya. Kami selalu berusaha menanganinya termasuk kami melibatkan Linmas dan pihak kepolisian. Jika memang tidak bisa ditangani, seperti kasus KDRT kami menyarankan untuk dikembalikan dulu ke orang tua masing-masing. Setelah itu, baru kami naikkan ke Mahkamah. Itulah salah satu bentuk pelayanan publik yang kami lakukan selama ini.”<sup>39</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat:

“Aparatur gampong selalu merespon dengan baik apabila terjadi keluhan dalam masyarakat apapun masalahnya termasuk pelayanan publik.”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan pak Muklis (Kasie Pemeintahan Gampong Seutui)

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq dan Pak Edi(Masyarakat Gampong Seutui)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Gampong Seutui cukup peka dan cepat tanggap dalam menanggapi aspirasi masyarakat gampong serta menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut didukung dengan fasilitas layanan pengaduan masyarakat, jadi masyarakat bisa langsung datang ke balai desa untuk mendengarkan keluh kesah warga, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan secara langsung, telepon dan sm. Pemerintah gampong Seutui juga melakukan pelatihan-pelatihan contohnya menjahit memasak guna untuk melatih warganya untuk berwirausaha akan tetapi ada permasalahan yaitu hanya beberapa warga saja yang setelah pelatihan melakukan atau menerapkannya.

e. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)

Prinsip konsensus merupakan prinsip selanjutnya yang diterapkan pada pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Seutui. Konsensus yaitu prinsip yang menitikberatkan pada cara musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Berikut hasil wawancara Sekdes Gampong Seutui:

“Kalau mengambil keputusan selalu musyawarah mufakat, itu merupakan azas kita di Gampong Seutui.”<sup>41</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muklis selaku Kasie Pemerintahan di gampong Seutui yaitu:

“Kami selalu melakukan musyawarah disetiap keputusan. Contohnya rapat yang kita buat termasuk dengan pihak luar salah satunya dengan RS

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

Harapan Bunda. Disini kita tidak memiliki mobil jenazah, jadi kita buat kesepakatan dengan mengundang Tuha Peut, kepala dusun, ketua pemuda dan petinggi dari Harapan Bunda. Disini kita bermusyawarah apabila ada masyarakat yang meninggal dunia pihak RS Harapan Bunda ikut membantu mengeluarkan mobil jenazah dengan tidak dipungutnya biaya atau gratis.”<sup>42</sup>

Dan berdasarkan wawancara dengan masyarakat:

“Jika ada musyawarah di gampong, masyarakat selalu ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan dan kebijakan pihak aparaturnya gampong selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat karena pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama dari pihak Gampong.”<sup>43</sup>

Dari hasil-hasil wawancara diatas didapatkan suatu kesimpulan bahwa prinsip orientasi kesepakatan yang berarti pemerintah memberikan penyelesaian masalah sudah diterapkan di Gampong Seutui. Salah satu wujud penyelesaiannya yang diberikan oleh petugas adalah ketika masyarakat membutuhkan layanan ambulance maka petugas layanan atau aparaturnya siap membantu untuk memberikan bantuan tanpa dipungutnya biaya. Kemudian di Gampong Seutui ini juga meanitikberatkan bahwa keorientasi konsesusnya di acara yang disebut *musrenbangdes*. Di mana acara tersebut membuktikan bahwa tata kelola Pemerintahan Gampong Seutui ini selalu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh gampong secara bersama-sama (musyawarah). Pemerintah Gampong Seutui ini menggunakan cara bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat, contohnya di acara *musrenbangdes*. Di dalam *musrenbangdes* warga desa beserta

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muklis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq dan Pak Edi(Masyarakat Gampong Seutui)

pemerintah desa bermusyawarah untuk membahas program-program pembangunan desa, kebijakan desa serta pembangunan dana desa. Pemerintah Gampong Seutui berusaha semaksimal mungkin untuk menjembatani apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dengan cara musyawarah di *musrembangdes* agar masyarakatnya menjadi adil dan sejahtera.

f. Keadilan (*Equity*)

Prinsip selanjutnya terkait prinsip good governance adalah prinsip keadilan yaitu prinsip yang menjunjung tinggi kesetaraan semua pihak di mata hukum.

Berikut hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui yaitu:

“Kalau masalah keadilan kami rasa disini kami sudah memberikan semua hal kepada masyarakat itu secara adil, dan setiap ada keputusan yang menyangkut dengan kemiskinan, apapun itu tetap kita musyawarahkan supaya ada keadilan.”<sup>44</sup>

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Kasi Pemerintahan:

“Untuk keadilan, semua kita lakukan kita tidak membedakan ras tetap dilayani dengan baik, prinsipnya di Warga Negara Indonesia.”<sup>45</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat:

“Memang tidak membeda-bedakan, diberikan pelayanan secara baik semuanya. Tidak ada perbedaan semua disamakan adil dan bijaksana serta tidak membedakan dari sudut pandang suku, ras dan agama. Prinsip ini telah diterapkan di Gampong Seutui.”<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ppik Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muklis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq dan Pak Edi (Masyarakat Gampong Seutui)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance keadilan (equity) di gampong Seutui sudah berjalan baik karena adanya kesadaran para petugas pemberi layanan dan juga didukung oleh arahan Geuchik Gampong Seutui. Serta para aparatur gampong tidak membeda-bedakan antara kerabat yang dikenal/tidak dikenal.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar kaitannya dengan input dan output. Agar pemerintahan efektif dan efisien maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes dan Kasie Pemerintahan:

“Untuk efektifitas dan efisiensi dapat dilihat dari visi misi yang ada di Gampong Seutui, visi misi kita disini harus sesuai dengan visi misi Walikota tidak boleh melenceng, apa visi misi Walikota itulah visi misi kita. Misalnya visi misi Walikota Banda Aceh yaitu Banda Aceh Gemilang dan kita sesuaikan dengan standar yang dibuat oleh Walikota melalui Kecamatan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat:

“Efektifitas dan efisiensi di Gampong Seutui sudah diterapkan dengan baik, akan tetapi jika petugas pelayanan tidak masuk maka pelayanan akan sedikit terhambat.”<sup>48</sup>

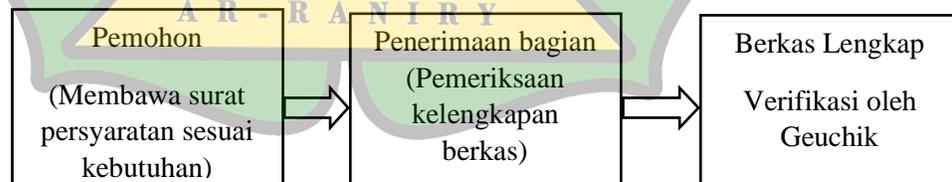
<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan pak Miswar dan Muklis (Sekdes dan Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq dan Pak Edi (Masyarakat Gampong Seutui)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance efektifitas dan efisiensi di Gampong Seutui sudah diterapkan dengan baik. Pemerintah gampong Seutui menyediakan Kantor Pelayanan Umum yang berada di balai desa gampong Seutui atau biasa disebut Kantor Geuchik, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah pemerintah Gampong Seutui sudah cukup baik, namun pelayanan sedikit terhambat karena beberapa petugas layanan yang kurang disiplin dalam bekerja sehingga pemberian pelayanan dianggap tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif. Untuk bidang kesehatan Pemerintah gampong Seutui juga mengadakan posyandu bagi balita setiap bulannya.

Keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan dan kejelasan alur atau proses pelayanan yang harus ditempuh. Dalam melayani, para staf memberikan prosedur pelayanan sehingga menimbulkan rasa percaya dan rasa aman kepada masyarakat

**Gambar 4.5**  
**Alur Prosedur Pelayanan**



Sumber : Peneliti 2022

Pemerintah desa dapat dikatakan berhasil dalam pelayanan kepada masyarakat apabila masyarakat itu sendiri sebagai penerima pelayanan merasa puas terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Pemerintah Gampong Seutui

telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan, pernikahan sudah gratis atau tidak dipungut biaya.

#### h. Akuntabilitas

Prinsip ini merupakan prinsip yang menitikberatkan kepada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program yang dilakukan. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visinya. Berdasarkan wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui:

“Saya telah melaksanakan koordinasi, sosialisasi program, komunikasi yang efektif, menjamin kompetensi petugas, adanya komitmen dan kejujuran serta mengutamakan demokratisasi untuk setiap permasalahan”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat:

“Aparatur Gampong Seutui melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab, ramah, sopan dan jelas dalam menyampaikan, dalam memberikan penjelasan simple, rinci, jelas, dan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami serta menguasai tugas dan terampil..”<sup>50</sup>

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Gampong Seutui:

“Sosialisasi dan layanan informasi disosialisasikan lewat kelurahan melalui rapat atau lewat media grup WhatsApp.”<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq dan Pak Edi (Masyarakat Gampong Seutui)

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Pak Mukhlis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

Wujud akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Gampong Seutui dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, kepala desa menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada pihak tertentu serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan keuangan APBG kepada masyarakat di acara *Musrengbangdes*. Dan perangkat desa melakukan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa prinsip Akuntabilitas di Kantor Geuchik Seutui sudah diterapkan dengan baik dan dari segi masyarakatnya juga sudah merasakan bahwa tidak adanya kendala di segi pertanggungjawaban.

i. Visi Strategis

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, badan pembangunan PBB pada tahun 1997, prinsip terakhir dari *good governance* adalah bervisi strategis. Bervisi strategis merupakan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Seutui:

“Kalau visi yang dijalankan cuma satu yaitu melaksanakan pembangunan gampong secara merata. Termasuk yg sedang dibangun sekarang adalah masjid.”<sup>52</sup>

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Pemerintahan:

“Salah satu visi yang sedang kami jalankan yaitu bagaimana cara membuat masyarakat berdaya, dimana pada tahun 2023 ini kita berdayakan masyarakat dengan membuat program yang dari dana desa yaitu ketahanan pangan. Tujuannya ialah membantu masyarakat membangun ekonominya dan sekarang sudah berjalan efektif.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Seutui:

“Visi misi yang dijalankan saat ini sudah efektif dan efisien dan berjalan dengan baik.”<sup>54</sup>

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Gampong Seutui sudah menerapkan prinsip terakhir dari *good governance* yaitu bervisi strategis. Salah satu bentuk visi strategis yang diterapkan di Gampong Seutui terkait pelayanan prima yaitu penyebaran informasi persyaratan pelayanan yang pada awalnya hanya melalui papan pengumuman kemudian berpindah ke sosialisasi-sosialisasi bahkan hingga melalui media sosial dan laman resmi Gampong Seutui. Akan tetapi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Gampong Seutui masih harus lebih ditingkatkan lagi agar visi misi dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Dan untuk pembangunan gampong juga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan pasal 78 UU NO 6

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Pak Muklis (Kasi Pemerintahan Gampong Seutui)

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Alfatah sidiq (Masyarakat Gampong Seutui)

Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu visi gampong Seutui saat ini adalah pembangunan. Contoh yang bisa dilihat saat ini adalah pembangunan masjid yang sedang berjalan di gampong Seutui.



**Gambar 4.6** Pembangunan masjid di Gampong Seutui

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya pembangunan masjid ini dapat mendukung pembangunan masyarakat. Pembangunan masjid tidak hanya memberikan manfaat spiritual dan sosial langsung, tetapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya masjid, wilayah sekitarnya cenderung mengalami peningkatan fasilitas umum seperti akses jalan, system sanitasi, dan ketersediaan air bersih. Pembangunan

masjid ini juga dapat menjad pendorong ekonomi lokal, misalnya melalui pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang melayani kebutuhan jamaah masjid.

#### **4.3 Faktor Penghambat Penerapan Prinsip “Good Governance” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui**

Faktor penghambat penerapan prinsip “good governance” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu kurangnya SDM dan penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan sehingga hasil kerja tidak maksimal serta kurangnya kedisiplinan para staf yang ada di Kantor Geuchik Seutui. Hambatan-hambatan tersebut sangat mempengaruhi penerapan prinsip “Good Governance” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekdes Gampong Seutui mengenai hambatan penerapan prinsip “good governance” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh diperoleh keterangan bahwa:

“Kalau hambatan yang ada disini adalah potensi dari beberapa pegawai yang belum berjalan sempurna, karena adanya beberapa kendala dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal yaitu kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip *good governance*, dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan dari faktor eksternal, kurangnya partisipasi masyarakat”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Pak Miswar (Sekdes Gampong Seutui)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa terdapat dua hambatan utama penerapan prinsip “*good governance*” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yaitu sumber daya manusia dan kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal yaitu masih terdapat staff desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

Berikut akan diuraikan secara jelas faktor penghambat penerapan prinsip “*good governance*” dalam pelayanan publik di Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia juga menjadi pendukung atau penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* hal ini sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi, dan sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dalam sebuah instansi. Oleh karena itu di Kantor Geuchik Gampong Seutui sendiri masih kurangnya potensi SDM dalam memberikan pelayanan dan penempatan SDM yang kurang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan, hal ini tentu akan berakibat pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Seutui diperoleh keterangan bahwa:

“Kalau yang tingkat ada jabatan kasi, dan kasubag yang ada jabatan sudah maksimal, tetapi dari staf kantor itu kurang, bisa dikatakan disiplin kurang sehingga sewaktu ada pekerjaan yang perlu dikerjakan kurang berjalan”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang telah dimiliki di Kantor Geuchik Gampong Seutui belum berjalan dengan baik, tentunya pihak dari kantor tersebut harus memberi hukuman bagi yang melanggar dengan aturan-aturan yang ditetapkan, agar dalam suatu instansi dapat berjalan dengan baik.’

## 2) Partisipasi masyarakat

Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri).

## 3) Kedisiplinan

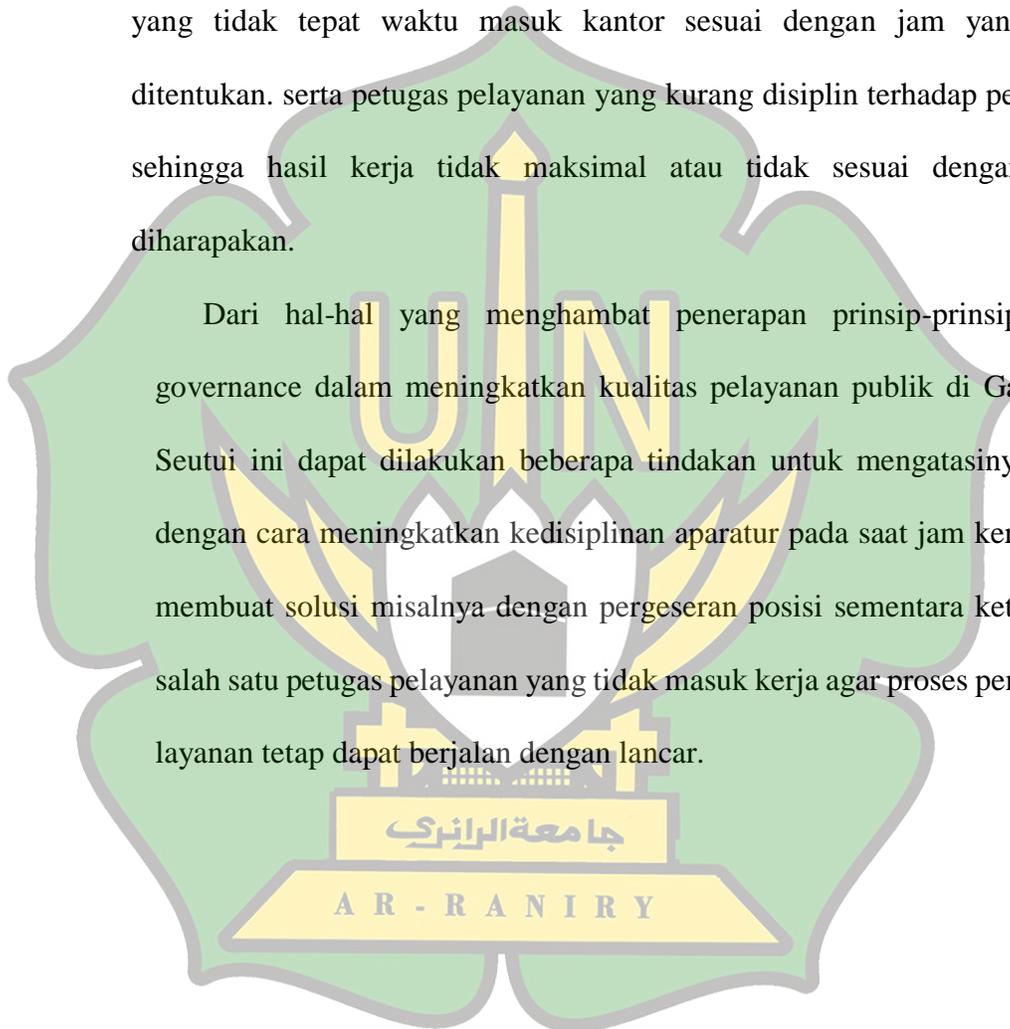
Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarah (Masyarakat Gampong Seutui)

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa masih terdapat hal yang dapat menghambat antara lain ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan, adanya pegawai yang tidak tepat waktu masuk kantor sesuai dengan jam yang telah ditentukan. serta petugas pelayanan yang kurang disiplin terhadap pekerjaan sehingga hasil kerja tidak maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hal-hal yang menghambat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Gampong Seutui ini dapat dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya yaitu dengan cara meningkatkan kedisiplinan aparatur pada saat jam kerja serta membuat solusi misalnya dengan pergeseran posisi sementara ketika ada salah satu petugas pelayanan yang tidak masuk kerja agar proses pemberian layanan tetap dapat berjalan dengan lancar.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Tingkat Gampong Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Tingkat Gampong Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme*. *Good governance* memiliki Sembilan karakteristik yaitu, partisipasi, (*Rule of Law*) Penegakan Hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan (*Consensus Orientation*), keadilan (*Equity*), efektifitas dan efisiensi akuntabilitas, dan visi strategis. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diketahui bahwa prinsip-prinsip tersebut sudah dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya berjalan kurang optimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa indikator dan dimensi yang masih terdapat hambatan. Salah satunya pada aspek transparansi pemerintahan Gampong Seutui belum adanya keterbukaan kejelasan transparansi berbasis digital jika layanan informasi pada website gampong dapat diakses dengan mudah maka

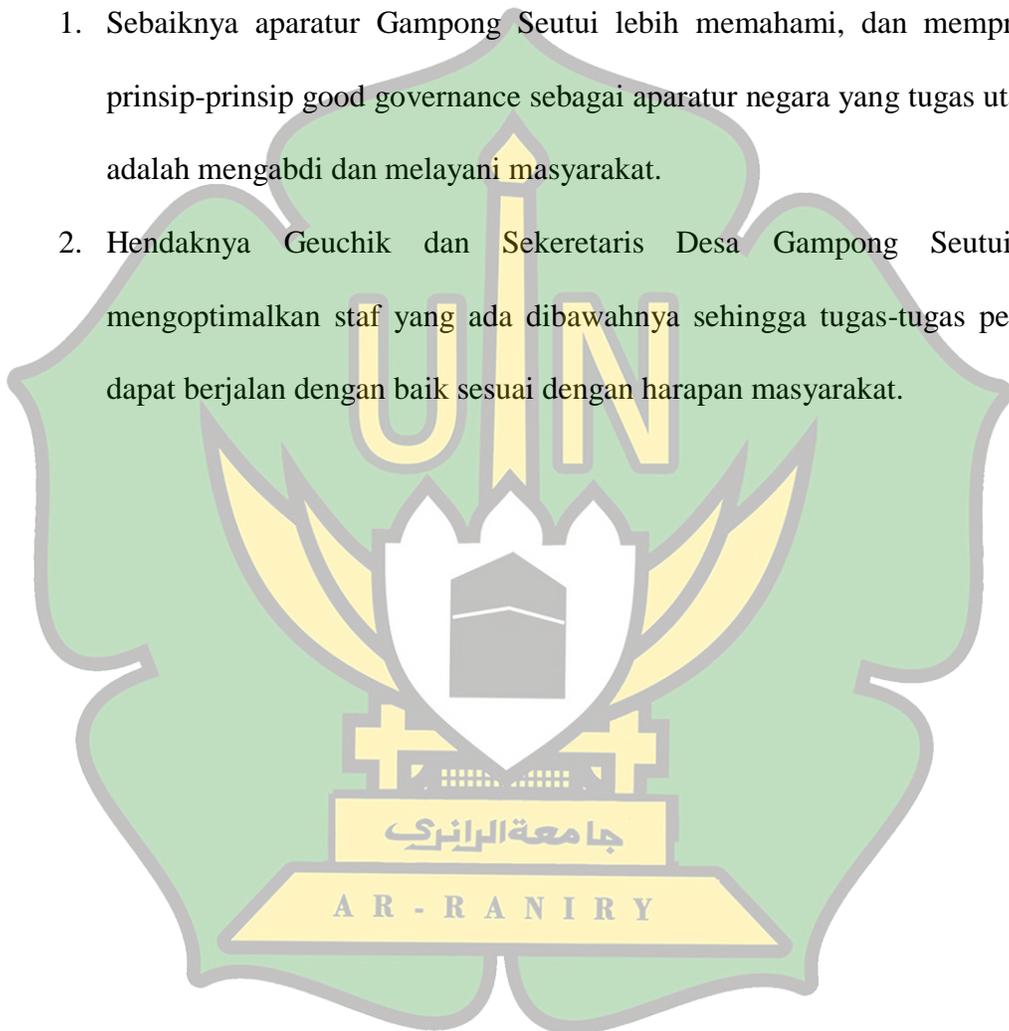
pemerintahan di gampong Seutui akan lebih transparan dan pada aspek akuntabilitas semua perangkat desa harus meningkatkan kinerjanya agar hasil yang dicapai dapat maksimal, sehingga menjadi Pemerintahan yang *good governance*. Untuk aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tanggap, keadilan, orientasi konsesus, dan visi strategis Pemerintah gampong Seutui sudah cukup bagus.

2. Adapun faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di kantor Geuchik Gampong Seutui berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan yaitu potensi dari pegawai belum maksimal, dan keberadaan pegawai yang masih kurang disiplin yaitu beberapa staff yang masuk hanya untuk absen dan ada yang keluar disaat jam kerja. Dan masih adanya aparatur gampong yang kurang paham terhadap fungsi kerjanya dalam memberikan pelayanan dalam menanggapi segala yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, dengan begitu pemberian pelayanan dianggap tidak berjalan dengan baik atau kurang efektif.

## 5.2 Saran

Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya aparat Gampong Seutui lebih memahami, dan mempraktikan prinsip-prinsip good governance sebagai aparat negara yang tugas utamanya adalah mengabdikan dan melayani masyarakat.
2. Hendaknya Geuchik dan Sekeretaris Desa Gampong Seutui lebih mengoptimalkan staf yang ada dibawahnya sehingga tugas-tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Marzihan, *Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Perincit Kecamatan Pusako Siak*, UIN SUSKA RIAU: 2013 Hlm. 8
- Erdipa Panjaitan, Rosmala Dewi, DKK, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat*. UMA: Juni 2019, perspektif, 2019. Hlm.33
- Damanik, Ephani Anggara, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun*, Skripsi diterbitkan, (USU:2019), Hlm 14
- Widjaja. HAW, *“Otonomi desa merupakan Otonomi yang Asli”*, Bulat, dan Utuh,(Jakarta: rajagrafindo persada, 2003), hlm. 3
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju: Bandung. Hlm 36
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju: Bandung. Hlm 38
- Indris Patarai *Ombudsman dan Akuntabilitas Public*. Makassar. De La Macca, Tahun 2015 Hal. 9
- Widodo Joko, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang:CV. Citra Malang Tahun 2001, Hlm. 46.
- Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creativ. Tahun 2021, Hlm. 13
- Raco, J.R. *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: (2010). PT. Grasindo, hlm 50
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 28.
- Sutopo HB, *Metode penelitian kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012), hlm.66

Lexy. J. Moleong, metodologi Penelitian kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 135

A.D. Gayatri, *Peningkatan Kemampuan Guru melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 Melalui Supervisi Akademik Metode Kelompok Bagi Guru Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 7 Surakarta. Jurnal Pendidikan*. Surakarta: Dwija Utama, Vol, 10 No. 1 Februari 2019. Hlm. 12

Moleong, J. lexy. *Metode Penelitian kualitatif*. (Bandun: Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal. 330

Nana Sudjana Dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), Hlm. 84

Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. R&D. Alfabeta: Bandung. Hal 49

#### **Undang-Undang Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Qanun Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Perangkat Desa

#### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2721/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

### TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 26 September 2022

Menetapkan  
PERTAMA

: Menunjuk Saudara  
1. Muazzinah, B.Sc., MPA.  
2. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

### MEMUTUSKAN

Sebagai pembimbing pertama  
Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi  
Nama : Rusy Mardhatillah  
NIM : 180802082  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Tingkat Gampong (Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

an. Rektor,  
Dekan,

Muji Mutiara

## Lampiran 2. Surat Penelitian

6/23/23, 9:41 AM

www.uin-ar-raniry.ac.id/admin/akademi/suratpenelitian/cetak/18772

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 2537321, Email : uin@uinaraniry.ac.id

Nomor : B-1241/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
 Kantor Geuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RUSY MARDHATILLAH / 180802082**  
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Aspol Lamteumen kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Tingkat Gampong (Studi Analisis di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Juni 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Desember 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc

جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

www.uin-ar-raniry.ac.id/admin/akademi/suratpenelitian/cetak/18772

3/1

## Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian


  
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
 KECAMATAN BAITURRAHMAN  
**GAMPONG SEUTUI**  
 Jalan STA. Johansyah No 24 Telp.....Banda Aceh 23243

---

Nomor : 423.4/422/GST/VII/2023  
 Sifat : Biasa  
 Hal : **Penelitian Ilmiah**

Banda Aceh, 12 Juli 2023  
 Kepada Yth  
 Bapak Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan  
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas  
 Islam Negeri AR-RANIRY  
 Banda Aceh

Di  
**Banda Aceh**

Dengan hormat,  
 Sesuai Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor B 1241/Un.08/FISIP.1/PP.00.9/06/2023 Tanggal 22 Juni 2023 **tentang Penelitian Ilmiah**, maka Keuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan ini menyampaikan kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh bahwa yang namanya tersebut dibawah ini,

Nama : **RUSY MARDHATILLAH**  
 NIM : 180802082  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
 Semester : X  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Universitas : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY  
 Banda Aceh

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh telah melaksanakan penelitian ilmiah di Gampong Seutui terhitung tanggal 27 Juni 2023 sampai Tanggal 12 Juli 2023  
 Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan seperlunya.

KEUCHIK GAMPONG SEUTUI, *af*  
  
 Ir. T. Aniruddin

## Lampiran 4. Panduan Wawancara

## Sekdes Desa Seutui

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Akuntabilitas (Accountability)	1. Bagaimana Bapak dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ?
2.	Transparansi (Transparency)	1. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi pelayanan publik yang disampaikan oleh aparatur gampong ke pihak pengguna layanan layanan publik ? 2. Apakah aparatur gampong selalu menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat mengenai program/kebijakan pelayanan publik ?
3.	Orientasi Kesepakatan	Dalam pengambilan suatu keputusan apakah masyarakat ikut serta dalam musyawarah tersebut ?
4.	Penegakan hukum (Rule of Law)	1. Bagaimana aparatur gampong dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik internal maupun eksternal selalu bersifat adil dan tidak membedakan ? 2. apakah penegakan hukum di gampong Seutui sudah dilaksanakan dengan baik 2. Apakah masyarakat pengguna layanan telah mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan?

		3. Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)?
5.	Partisipasi	Apakah masyarakat dan swasta berpartisipasi dalam pelayanan publik di Gampong Seutui ?
6.	Efektifitas dan Efisiensi	Apakah aparatur Gampong Seutui mampu menjalankan visi-misi yang ada dikantor Geuchik tersebut ?
7.	Keadilan (Equity)	Bagaimana bapak dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik internal maupun eksternal selalu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan?
8.	Responsif	1. Bagaimana respon aparatur gampong jika masyarakat memiliki persoalan dalam pelayanan? 2. Apakah aparatur gampong selalu merespon apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik?
9.	Visi Strategis	Apakah visi-misi yang dijalankan sudah efektif dan efisien?

#### Kasi Pelayanan Kantor Geuchik Desa Seutui

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Akuntabilitas (Accountability)	Bagaimana tanggung jawab bapak sebagai petugas layanan dalam pelaksanaan tugas?
2.	Transparansi (Transparency)	1. Bagaimana keterbukaan dalam proses pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Seutui?
3.	Responsif	1. Apakah aparatur gampong selalu merespon apabila terjadi keluhan

		masyarakat terkait dengan pelayanan publik?
4.	Penegakan hukum (Rule of Law)	1. Apakah penegakan hukum sudah dilaksanakan dengan baik?
5.	Efektifitas dan Efisiensi	Apakah aparatur gampong Seutui mampu menjalankan visi-misi yang ada dikantor Geuchik tersebut?
6.	Orientasi Kesepakatan	Dalam pengambilan suatu keputusan apakah masyarakat ikut serta dalam musyawarah tersebut?
7.	Partisipasi	Apakah petugas pelayanan publik sudah merespon dengan baik masukan atau tanggapan yang datang dari masyarakat?
8.	Keadilan	Bagaimana Bapak/Ibu dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik internal maupun eksternal selalu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan?
9.	Visi Strategis	Apakah visi-misi yang dijalankan sudah efektif dan efisien?

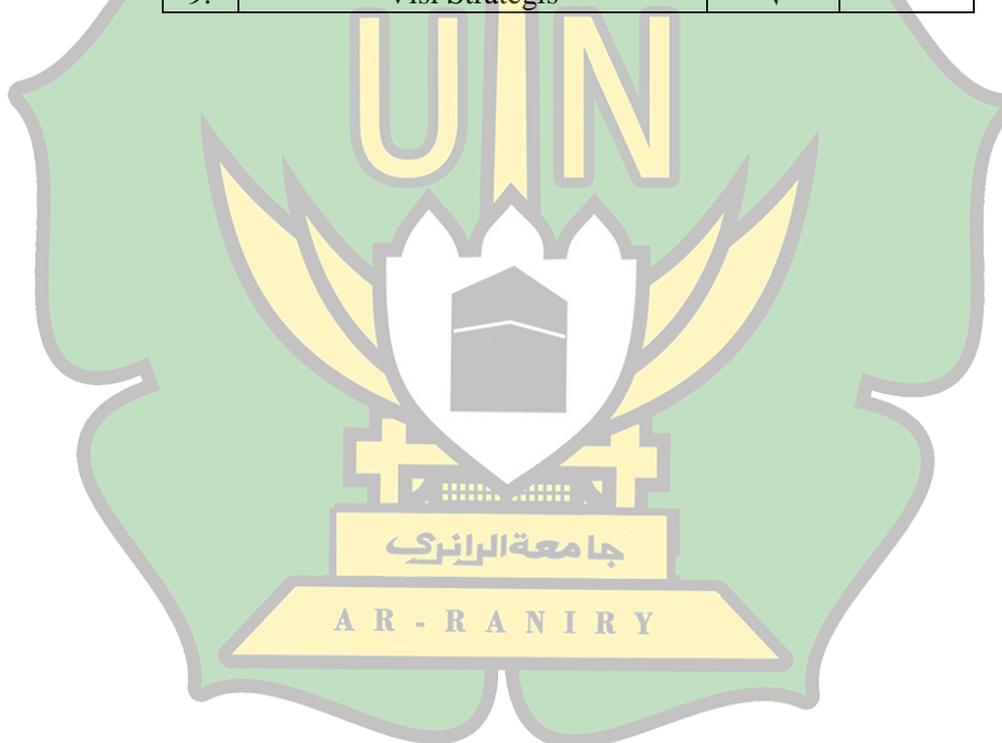
#### Bagi Masyarakat Desa Seutui

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Akuntabilitas (Accountability)	1. Bagaimana tanggung jawab petugas layanan dalam pelaksanaan tugas? 2. Bagaimana perlakuan petugas dalam memberikan layanan? 3. Bagaimana kompetensi petugas layanan di Kantor Geuchik Gampong Seutui?
2.	Transparansi (Transparency)	1. Bagaimana keterbukaan informasi yang disampaikan petugas?

		2. Bagaimana prosedur layanan di Kantor Geuchik Seutui?
3.	Keadilan (Equity)	1. Bagaimana keramahan petugas layanan? 2. Bagaimana sikap keadilan petugas yang tidak membedakan?
4.	Penegakan hukum (Rule of Law)	1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di gampong Seutui?
5.	Responsif	Bagaimana respon aparatur gampong jika masyarakat memiliki persoalan dalam pelayanan?
6.	Orientasi kesepakatan	Dalam pengambilan suatu keputusan apakah masyarakat ikut serta dalam musyawarah tersebut?
7.	Partisipasi	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.
8.	Efektifitas dan Efisiensi	Apakah aparatur gampong sudah efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat?
9.	Visi Strategis	Apakah visi-misi yang dijalankan sudah efektif dan efisien?

## Lampiran 5 Instrumen Observasi

No.	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> yang dijalankan	Baik	Kurang Baik
1.	Transparansi		√
2.	Partisipasi	√	
3.	Penegakan hukum	√	
4.	Responsif	√	
5.	Orientasi Kesepakatan	√	
6.	Keadilan	√	
7.	Efektifitas dan efisiensi	√	
8.	Akuntabilitas	√	
9.	Visi Strategis	√	



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Rusy Mardhatillah  
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 5 Agustus 2000  
Nomor Handphone : 0853-6027-7087  
Alamat : Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang  
Kabupaten Bireuen

Email : 180802082@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Bireuen  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Bireuen  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Bireuen

### Sertifikasi

Ma'had Al Jami'ah : B | 2021  
TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
Komputer : A | 2022 | ICT UIN Ar-Raniry  
Magang : A | 2021 | Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh